

Inovasi PDIP dalam Pilkada

Oleh Muchamad Yuliyanto

PDIP partai dominan di Jateng telah mengawali pemanasan Pilkada Serentak 2020 dengan kejutan mengumumkan pasangan calon di 12 daerah. Tentu keberanian Partai Banteng Merah ini bukan tanpa alasan, karena telah menunjukkan inovasi kebijakan yang tak pernah dilakukan pilkada sebelumnya.

Beberapa alasan dapat dianalisis dengan melihat partai ini menyampaikan pasangan calon jauh sebelum perhelatan demokrasi elektoral. Pertama, PDIP akan makin menguatkan Jateng adalah lumbung suara sekaligus “kandang Banteng” yang tak mudah digeser partai lain. Kedua belas daerah pasti telah ditelaah dapat digaransikan bagi kemenangan dalam pilkada sekaligus basis Pemilu 2024. Adagium politik “siapa menguasai Jawa maka akan menguasai Republik” masih diyakini elite partai.

Kedua, soliditas, stabilitas struktur, dan militansi kader PDIP di Jateng masih dapat diandalkan sebagai mesin kemenangan dalam pemilu apa pun, karena keberhasilan Bu Mega menggembelng kader sekaligus menata struktur melalui orang-orang kepercayaan di daerah.

Ketiga, deklarasi pencalonan secara serentak pada awal tentu sebagai upaya merawat sekaligus menun-

jukan keberhasilan inovasi kebijakan melalui sikap “tegak lurus” sebagaimana dicanangkan ketua DPD PDIP Jateng selama ini, yang akan memengaruhi mentalitas kader dan pasangan calon dalam Pilkada 2020.

Keempat, ibarat balapan Formula 1, maka PDIP telah menunjukkan kesiapan *all out* sejak pemanasan mesin partai, kesiapan bahan bakar sampai ditentukan pengemudi lengkap dengan manajer lapangan dalam kompetisi pilkada.

Kelima, inovasi kebijakan yang bersifat motivatif adalah ketika kabupaten/kota mampu memenangi 20 persen perolehan kursi DPRD maka DPC bersangkutan diberi prioritas mengajukan pasangan calon sesama kader internal partai dan memberlakukan perekrutan “tertutup” bagi pasangan dari luar PDIP. Ini salah satu cara memotivasi kerja politik struktur dan kader daerah dan terbukti ampuh di beberapa daerah.

Keenam, langkah PDIP sejak awal mengumumkan pasangan calon menunjukkan keterampilan komunikasi politik yang makin matang dan percaya diri. Koalisi yang dibangun bersama partai lain, meski sesungguhnya bisa mengajukan pasangan calon secara mandiri, patut diapresiasi. Sebab, sebagai partai telah *legawa* mempraktikkan kemajemukan politik di Jateng seperti halnya inti nasionalisme sebagai ideologi partai. Padahal besar kemungkinan hanya terdapat calon tunggal pada pilkada serentak. Seperti di Kota Semarang, Boyolali, Grobogan, dan Wonogiri.

Ketujuh, pola kemenangan dengan strategi gotong royong seluruh sumber daya partai untuk kemenangan pilkada juga merupakan kelebihan partai ini dibanding partai lain yang sering kesulitan mewujudkan soliditasnya.

Keberlanjutan Inovasi

Adapun kebijakan PDIP yang ditunggu adalah nasib pasangan calon bagi daerah yang belum diputuskan. Hal menarik adalah langkah inovatif menampilkan pasangan calon yang bakal melengkapi target kemenangan pilkada serentak sedangkan partai menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya di daerah tersebut, seperti tidak dapat mengajukan calon secara mandiri, belum ditemukannya pasangan potensial, komunikasi politik koalisi masih

buntu, situasi internal belum solid, krisis kader pemimpin, bahkan pesaing berat dari calon lain. Maka diperlukan keberanian DPP berinovasi “keluar pakem” seperti melanjutkan membuka perekrutan di DPD ataupun DPP bahkan menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif kepada ketua umum.

Elite pengurus pusat perlu mencermati dinamika politik lokal secara objektif untuk menemukan pasangan calon yang potensial dan melanjutkan tren kemenangan pilkada di Jateng. Perhatian ekstra dalam mencari figur pasangan tak dapat dianggap enteng dan mudah, jika ingin memperluas basis di provinsi ini. Kebijakan berani keluar pakem karena situasi *extra ordinary* bisa jadi diperlukan DPP seperti penentuan calon di Kota Solo karena terdapat calon yang ekstra, selanjutnya Sukoharjo berdasar pertimbangan isu sensitif terkait dinasti keluarga, atau Kabupaten Kendal dengan melihat figur potensial dan anak daerah yang mampu merealisasikan penguatan basis sekaligus membesarkan partai.

Kalaupun PDIP harus berkoalisi dalam formasi pasangan calon, tetap mempertimbangkan pluralitas politik lokal demi menyiram pohon kemajemukan yang memperkuat NKRI. Hal demikian juga dalam rangka peran partai mengerem laju meningkatnya radikalisme sosial akhir-akhir ini sebagai efek dominasi politik yang mudah dianggap tidak dapat memberi manfaat dan perhatian pada masyarakat yang majemuk. Sebab, hal itu memudahkan gejala perlawanan yang disiram dengan bensin agama, etnisitas dan golongan yang dapat menggoyahkan sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Terakhir, bagian substansi konsolidasi demokrasi adalah terpilihnya pemimpin daerah yang makin menyejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya, sebagaimana pesan Max Weber (2002) bahwa politik adalah panggilan hati nurani untuk mengabdikan pada kepentingan umum dan kebaikan. Semoga saja terpenuhi. (40)

—Muchamad Yuliyanto, staf pengajar Komunikasi Politik Undip, pengelola LPSI dan mentor politik di wilayah Jawa Tengah.

